

**PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM
PENGELOLAN STOK PANGAN
DI KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

REKA YOLANDA
NIM. 160802045

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reka Yolanda
Nim : 160802045
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat tanggal lahir : Ds.Baroh Cot, 13 Mei 1998
Alamat : Gp. Mns. Baroh Cot, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Reka Yolanda

Reka Yolanda
NIM. 160802045

**PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM
PENGELOLAN STOK PANGAN
DI KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:
Reka Yolanda
NIM. 160802045

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si
NIP. 196110051982031007


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIDN. 2002079001

PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM PENGELOLAAN STOK PANGAN DI KABUPATEN PIDIE

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 Desember 2020 M
2 Jumadil Awal 1442 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,



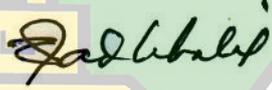
Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIDN. 2002079001

Penguji I,



Eka Januar, M.Sos.Sc.
NIP. 198401012015031003

Penguji II,



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIDN. 2019119001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002



ABSTRAK

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie dan bagaimana tantangan dan hambatan pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas pertanian dan pangan dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie dan untuk mengetahui bagaimana tantangan dan hambatan pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dinas Pertanian dan Pangan sudah menjalankan tugasnya dalam pengelolaan pangan di buktikan melalui tiga indikator. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu Dinas Pertanian dan Pangan sudah berperan namun belum maksimal di buktikan dari tiga indikator hanya dua indikator yang sudah berperan . Pertama, peran aktif adanya melakukan kerja sama dan koordinasi dengan dolog untuk stok pangan, dan juga melakukan pengelolaan stok pangan skala kecil dengan membangun lumbung pangan kepada masyarakat. Kedua, peran partisipasif dalam pelaksanaan pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie, dengan menyelenggarakan pasar murah disaat terjadi kenaikan harga dipasaran pada waktu tertentu serta juga melakukan peningkatan kualitas SDM. Sedangkan peran pasif sudah berperan namun belum efektif didapati bahwa pangan beras yang sudah dikelola oleh masyarakat terhambat dalam proses penjualan beras keluar daerah dikarenakan pengetahuan masyarakat yang kurang terkait dengan ekspor.

Kata kunci: *Peran Dinas Pertanian dan Pangan, Pengelolaan Stok Pangan, Kabupatem Pidie*

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat serta pengikut-Nya. Adapun judul skripsi ini, yaitu “Peran Dinas Pertanian dan Pangan Dalam Pengelolaan Stok Pangan Di Kabupaten Pidie”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ibunda tercinta Tihajar dan ayahanda Ibrahim yang telah merawat, mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta senantiasa mendoakan peneliti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Semoga jerih payah dan ketulusan kedua orang tua peneliti mendapat balasan di sisi Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun semua itu dapat penulis selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin. AK., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

5. Terima kasih kepada pembimbing I Dr. S. Amirulkamar, MM.,M.Si dan pembimbing II Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing peneliti dan selalu memberi masukan dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si, selaku penasehat akademik yang telah membantu dalam rencana studi selama perkuliahan.
7. Terima kasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Prodi Ilmu Administrasi Negara khususnya unit 2 Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu, memotivasi, dan menyemangati penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi, dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti berusaha yang terbaik dalam penulisan skripsi ini, namun peneliti menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan cukup diharapkan peneliti demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, 8 November 2020

Peneliti,

Reka Yolanda
NIM. 160802045

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Penjelasan Istilah.....	6
1.7 Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Teori Peran	16
2.3 Teori Pengelolaan.....	22
2.4 Pangan	24
2.5 Hambatan	29
2.6 Teori Organisasi.....	29
2.7 Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
3.1 Gambaran umum dinas pertanian dan pangan	35
3.2 Kedudukan dan kewenangan.....	40
3.3 Tugas pokok dan fungsi	41
3.4 Visi misi dinas pertanian dan pangan.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Peran Dinas Pertanian dan Pangan Dalam Pengelolaan Stok Pangan di Kabupaten Pidie	44

4.2 Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Pengelolaan Stok Pangan di Kabupaten Pidie	51
--	----

BAB V PENUTUP

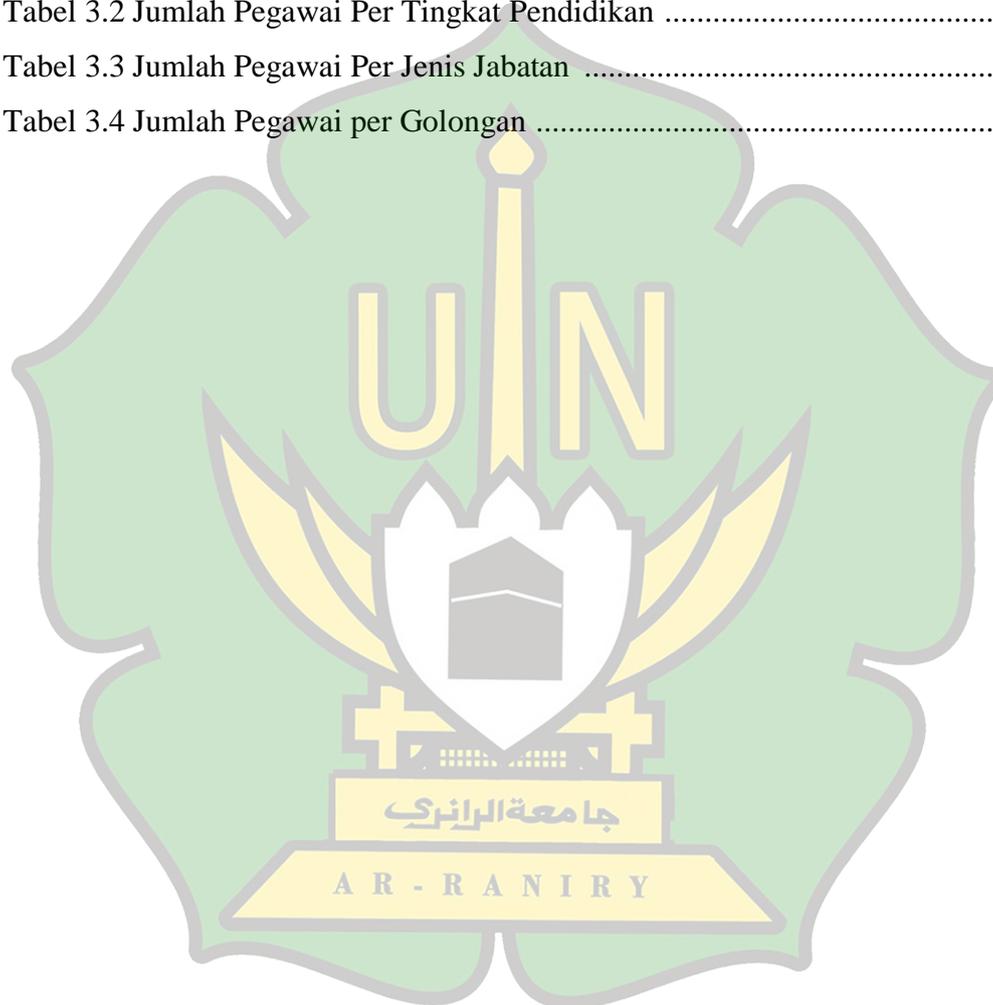
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fokus Penelitian	8
Tabel 1.2 Informan Penelian	9
Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Per Jenis Kelamin	39
Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Per Tingkat Pendidikan	40
Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Per Jenis Jabatan	40
Tabel 3.4 Jumlah Pegawai per Golongan	40



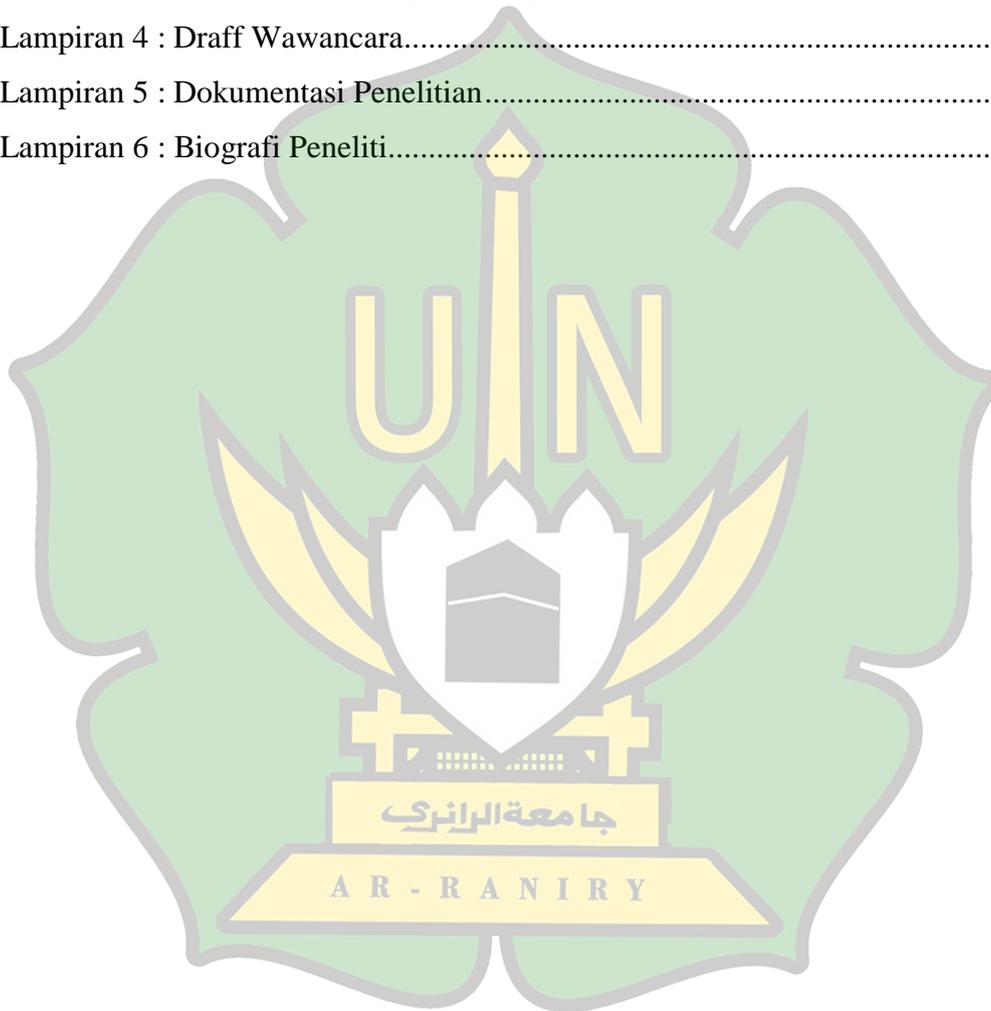
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 3.2 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-raniry.....	61
Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian	62
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie	63
Lampiran 4 : Draff Wawancara.....	64
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian.....	67
Lampiran 6 : Biografi Peneliti.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Tujuan penting lainnya juga meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, pelaku usaha pangan, melindungi serta mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.¹ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan pangan sangat penting bagi masyarakat dan pentingnya pangan ini menyangkut hidup matinya sebuah bangsa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 menjelaskan tentang ketahanan pangan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan

¹ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Panga

ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.²

Kebutuhan pangan terutama beras merupakan kebutuhan dasar manusia sehari-hari yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kelangsungan hidup, jadi dapat dikatakan selama masih ada kehidupan manusia maka disitu pangan sangat dibutuhkan. Beras sebagai salah satu kebutuhan pokok utama manusia, hal ini menjadi sektor yang strategis dapat dipahami karena pengeluaran pemerintah untuk sektor ini tiap tahunnya cukup besar. Meskipun sebagai bahan makanan, beras dapat digantikan atau disubstitusikan dengan bahan makanan lainnya namun beras memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan tidak mudah digantikan dengan makanan lain.

Sektor Pertanian merupakan sektor yang cukup penting di Indonesia karena Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian pendapatannya didapatkan dari pertanian. Dinas Pertanian tanaman pangan adalah sebuah instansi milik negara yang membantu mengembangkan sektor pertanian di Indonesia. Di Aceh mayoritas masyarakat yang tinggal di pedesaan banyak dari mereka adalah petani. Sebagai instansi pemerintah yang membantu mengembangkan potensi sumber daya alam di bidang pertanian, dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultural perlu mengetahui daerah mana yang merupakan daerah yang tidak terjangkau air irigasi atau kekurangan air pada suatu kabupaten atau daerah mana yang sering mengalami kekeringan. Sehingga pemerintah harus dapat mengembangkan atau

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan

mengarahkan daerah tersebut agar mendapatkan air yang baik, guna untuk menghasilkan produk pertanian yang unggul dan dapat memproduksi padi setahun dua atau tiga kali.³ Dari penjelasan di atas dinas pertanian sangat berperan di ketahanan pangan karena dinas pertanian membantu mengembangkan sumber daya alam di bidang pertanian dan terus mengontrol daerah yang kekurangan air agar mendapatkan aliran air yang cukup untuk pertanian.

Aceh merupakan provinsi dengan struktur tenaga kerja di Aceh didominasi sektor jasa-jasa dibandingkan sektor pertanian dan sektor industri selama periode 2017-2018. Persentase penduduk yang bekerja di sektor jasa mencapai 44,01 persen pada 2018. Sedangkan sektor pertanian mencapai 39,29 persen.

Pidie merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Kota Sigli, Kabupaten Pidie merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di provinsi Aceh. Pidie memiliki beragam potensi wisata, perkebunan, kelautan, dan sumber daya alam yang terbesar di 23 Kecamatan. Di Pidie ada lima kecamatan yang rentan pangan, yaitu Batee, Tangse, Geumpang, Tiro, dan Padang Tiji.⁴

Pada dasarnya Pidie merupakan salah satu daerah penghasil beras (Beras Tangse). Namun, hasil panen pertanian padi di Kabupaten Pidie tidak maksimal, sebelumnya produksi padi dalam satu hektar menghasilkan 6 ton, akan tetapi di tahun 2019 ini produksi padi menurun yaitu hanya 5 ton. Penyebab menurunnya hasil panen yaitu karena diserang hama wereng, sehingga Pidie masih kekurangan

³ Asril Gunawan, *Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Indrapuri*, skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2017) hal.13

⁴ Sinar Pidie.com, <https://sinarpidie.co/news/lima-kecamatan-di-pidie-ini-rentan-pangan/index.html>, (diakses pada tanggal 6 agustus 2020)

dalam hal pangan terutama beras.⁵ Pada tahun 2014 kemiskinan 20.29%, Tahun 2015 kemiskinan 21.18%, tahun 2016 kemiskinan 21.25% dan tahun 2017 kemiskinan 21.43%, salah satu faktor penyebab kemiskinan di kabupaten Pidie yaitu masalah pangan.⁶

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang pertanian dan pangan serta urusan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Peraturan Bupati Pidie Nomor 22 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja dinas pertanian dan pangan kabupaten pidie.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Dinas Pertanian dan Pangan Dalam Pengelolaan Stok Pangan Di Kabupaten Pidie”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah masih ada kecamatan yang rentan pangan di Kabupaten Pidie yang pada dasarnya Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten penghasil beras, sehingga Dinas pertanian berperan untuk ketahanan pangan di Kabupaten Pidie dan memiliki fungsi untuk kesejahteraan masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie?

⁵ Serambinews, *musim rendengan kali ini, produksi padi menurun*, <https://aceh.tribunnews.com/2019/02/26/musim-rendengan-kali-ini-produksi-padi-di-pidie-menurun>,(diakses pada tanggal 19 November 2019)

⁶ BPS Kabupaten Pidie, *Pidie Dalam Angka*, Tahun 2018

2. Bagaimana tantangan dan hambatan pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui bagaimana tantangan dan hambatan pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, kegunaan hasil penelitian ini mencakup beberapa hal yaitu sebagai berikut.

1) Akademik

Diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat secara akademis yaitu tambahan referensi atau acuan bagi mahasiswa atau pihak lain ataupun bahan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan dan menggunakan penelitian.

2) Teotitis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dalam bidang keilmuan khususnya di bidang kesejahteraan sosial serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

3) Praktis

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai Dinas Pertanian dan Perkebunan serta dampak bagi masyarakat sekitarnya. Dan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

1.6 Penjelasan Istilah

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai judul skripsi “Peran Dinas Pertanian dan Pangan Dalam Pengelolaan Stok Pangan Di Pidie”, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.
2. Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan di bidang pertanian yang berfungsi untuk pengawasan usaha petani, memfasilitasi petani dan untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Pengelolaan merupakan Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
4. Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Kecukupan pangan merupakan hak asasi yang layak dipenuhi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Nasir, penelitian deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menaksirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Erickson penelitian kualitatif merupakan suatu usaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.⁷

Metode penelitian ialah proses persiapan komponen-komponen penelitian seperti halnya pengumpulan data, analisis data, dan perlengkapan penelitian.⁸ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin melihat langsung bagaimana pemerintah dalam mengatasi rawan pangan di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang didapat dari lapangan. Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang sumber daya dan proses penelitiannya menggunakan kancah atau lokasi tertentu sesuai dengan yang dipilih.⁹

⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat:CV Jejak,2018) hal.7

⁸ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2010) hal.9-10

⁹ Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta:Prestasi Public Publisher,2012) hal.56

Metode ini sebagai pedoman peneliti agar dapat mempelajari secara mudah latar belakang suatu keadaan sosial yang menyangkut individu, kelompok, lembaga atau kumpulan masyarakat.

1.7.2 Fokus Penelitian

Tabel 1.1 Fokus Penelitian

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Peran Dinas Pertanian dan Pangan	<p>a. Peran aktif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.</p> <p>b. Peran partisipasif merupakan peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.</p> <p>c. Peran pasif merupakan suatu peran yang tidak dilaksanakan individu. Artinya peran pasif hanya di pakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.</p>	Rosramadhana, dkk. Menulis Etnografi Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis. (Yayasan Kita Menulis,2020)hal .87

1.7.3 Lokasi Penelitian

Peneliti menjadikan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Pidie masih ada Kecamatan rentan pangan, yang pada dasarnya Pidie salah satu kabupaten penghasil beras dan juga merupakan daerah pertanian yang sangat luar.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer merupakan sumber data dengan menggunakan teknik wawancara dengan para informan. Adapun informan dalam

penelitian ini sebagai berikut: Kepala bidang ketahanan pangan, kepala seksi ketersediaan dan kerawanan pangan dan masyarakat.

2. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang di peroleh dari tinjauan kepustakaan kemudian diperoleh dari jurnal, skripsi, artikel, internet, berita dan monografi lokasi penelitian.

1.7.5 Informan Penelitian

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1	Karena yang berwenang dalam pengelolaan stok pangan berdasarkan peraturan bupati Pidie Nomor 22 Tahun 2017
2.	Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	1	Yang membantu kepala bidang ketahanan pangan dalam pengelolaan stok pangan berdasarkan peraturan bupati Pidie Nomor 22 Tahun 2017
3.	Penyuluh/Ketua Kelompok Tani 1. Gapoktan Saree Meugoe Gampong Neulob II 2. Meugoe Beusare Gampong Kembang Busu	2	Masyarakat yang terkena dampak dalam pengelolaan stok pangan

Sumber: Data diolah tahun 2020

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke masyarakat, ke organisasi, ke komunitas. Data

yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.¹⁰

Menurut Arikunto observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan diteliti.¹¹ Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut juga observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki. Dalam kegiatan pengumpulan data, metode observasi merupakan salah satu metode utama disamping metode wawancara. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan dengan 2(dua) cara antara lain:

1. Pengamatan berperan serta, merupakan seseorang pengamatan melakukan dua peran sekaligus sebagai pengamatan dan menjadi anggota resmi dari objek atau kelompok yang diamati.

¹⁰ J.R. Raco, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya...* hal.112.

¹¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta,2006) hal.124

2. Pengamatan tanpa berperan serta, yaitu seseorang pengamatan hanya berfungsi untuk melakukan pengamatan saja, tanpa ikut menjadi anggota dari objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu pada Kabupaten Pidie. Pengamatan dilakukan secara langsung ditempat yang menjadi objek penelitian, sedangkan objek yang diamati adalah peran dinas pertanian dan pangan dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie.

b. Wawancara

Wawancara atau interviu adalah sebuah proses memperoleh keterangan atau tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹²

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah kepala bidang ketahanan pangan, seksi-seksi yang mengatur tentang ketahanan pangan, serta masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat kerana dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek

¹² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Kominikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Ed. 2*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.136.

atau suasana penelitian. Peneliti dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh obyek yang diteliti. Pengumpulan data perlu didukung pula dengan pendokumentasian, dengan foto, video dan VCD.¹³

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹⁴

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis, yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.¹⁵ Menurut Miles dan Huberman analisis terjadi dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (data reduction), paparan/sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan.

Taknik analisis data dilakukan dengan cara:

1. Tahap Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah/data

¹³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal. 157.

¹⁴ Suryana, *Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif buku ajaran perkuliahan*, (Universitas Pendidikan Indonesia:2010)

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabet,2013) hal.335

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema. Penelitian dituntut harus memiliki kemampuan berpikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Tahap penyajian data, penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.
3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum.¹⁶

¹⁶ Milles dan Heberman, *analisis data kualitatif*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press,1992) hal.16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Peran Dinas Pertanian dan Pangan Dalam Pengelolaan Stok Pangan di Kabupaten Pidie”. Dari beberapa penelusuran internet terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang peran dinas pertanian dan perkebunan dalam pengelolaan stok pangan, penelitian tersebut yaitu:

2.1.1 Penelitian yang sudah dilakukan oleh Asril Gunawan (2017), dengan judul “*Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Indrapuri*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dihadapi dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura kabupaten aceh besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kecamatan indrapuri, untuk mengetahui tantangan pembangunan pertanian. Untuk mendapatkan data tersebut penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh dinas pertanian Aceh Besar tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan

kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.¹⁷

2.1.2 Penelitian yang sudah dilakukan oleh Hening Febriana (2019), dengan judul “*Strategi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Tangerang*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di kabupaten tangerang. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal dikarenakan masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan program-program tersebut.¹⁸

2.1.3 Penelitian yang sudah dilakukan oleh Alim Bahri Usmadi (2013), dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Sektor Produksi dan Distribusi Pangan (Studi Pada Desa Mettoanging Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)*”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai peranan pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi sektor produksi dan distribusi pangan pada desa mettoanging kecamatan kajang kabupaten bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar yang menjadi pelaku ekonomi pada sektor

¹⁷ Asril Gunawan, “*Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Indrapuri*”, Skripsi: (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

¹⁸ Hening Febriana, “*Strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Tangerang*”, Skripsi: (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2019).

produksi dan distribusi pangan berjenis kelamin pria, sebagian besar pekerjaannya petani, dengan umur sebagian besar >35 tahun. Persepsi masyarakat terhadap peranan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi sektor produksi dan distribusi pangan pada desa mettoanging kecamatan kajang kabupaten bulukumba berdasarkan arah kebijakan pengembangan ekonomi mengacu pada peningkatan sistem produksi dan distribusi pangan, penentuan sikap dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan pengawasan konversi lahan pertanian, menggunakan teknologi dan pengawasan produksi dan distribusi hasil pertanian.¹⁹

Berdasarkan skripsi yang telah dijabarkan terdapat kesamaan dan perbedaan yang dibahas dalam penelitiannya. Kesamaannya objek yang dikaji sama-sama mengenai pangan. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi dan tinjauan teori yang digunakan dalam menganalisis objek yang sama tersebut.

2.2 Teori Peran

2.2.1 Pengertian Peran

Istilah peran kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Dalam kamus bahasa indonesia pengertian peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

¹⁹ Alim Bahri Usmadi, *“Persepsi masyarakat terhadap peranan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi sektor produksi dan distribusi pangan”*, Skripsi: (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).

Peran merupakan kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sebagai kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.²⁰

Peran suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam skruktur sosial dan serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi.²¹ Peran yaitu serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan bedasarkan dengan karakternya . kondisi tersebut bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang dalam melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan kata hatinya.²²

Secara sosiologis, peran merupakan dinamisasi dari status maupun penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga sebagai status subjektif. Menurut soekanto peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Jika seseorang sudah melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka dia sudah menjalankan suatu peran.²³ Kemudian peran lebih banyak menujuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peran mencakup tiga hal yaitu:

²⁰ Hamami Cahya Prastika, “ *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*”, Skripsi, (Universitas Airlangga,2016) hal.21

²¹ Ibid., hal.22

²² Miftah Thoah. [https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/\(diakses pada tanggal 25 juli 2020\)](https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/(diakses%20pada%20tanggal%2025%20juli%202020).).

²³ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Managemen Public*, (Jakarta:PT Grasindo,2005) hal.43

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat²⁴

Peran yaitu aspek dinamis dari kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Norma-norma yang dimaksud secara sosial dikenal ada empat meliputi cara berhubungan antar individu dalam masyarakat. Kebiasaan seseorang yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama sebagai tanda bahwa orang tersebut banyak menyukai perbuatan tersebut. Tata kelakuan yang merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok masyarakat yang dilaksanakan sebagai alat pengawas baik secara sadar maupun tidak sadar. Sementara itu norma yang berupa adat istiadat berbentuk pola-pola perilaku masyarakat dalam kehidupan.²⁵

²⁴ Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT setia purna inves, 2007) hal.24

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hal.174

Menurut Robert Linton dalam Musaddad Peran merupakan Interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntut kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.²⁶ Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang berperilaku sesuai dengan peran.

Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Jadi dengan adanya saling ketergantungan maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai

²⁶

Aco Musaddad, *Annangguru*, (Sulawesi Barat:Gerbang Visual,2018) hal.28

lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang belainan.²⁷ Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

Menurut Siswanto dan Miftah Thoha ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antarpribadi, dalam peranan anatr pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Peranan sebagai tokoh, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b. Peranan sebagai pemimpin, dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi di antaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan dan mengendalikan.
 - c. Peranan sebagai pejabat perantara, disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi, peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.²⁸

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

²⁷ Miftah Thoha, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012) hal.10

²⁸ Miftah Thoha, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. hal. 21.

1. Peranan yang diharapkan, cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;
2. Peranan yang disesuaikan yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang di sesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki suatu hak atau kedudukan tertentu.

2.2.2 Indikator Peran

Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka itulah yang disebut dengan peran. Jenis-jenis peran yaitu peran aktif, peran partisipasi, peran pasif:²⁹

1. Peran aktif

Peran aktif adalah peran pelaksana kegiatan yang selalu aktif dalam tindakan pengelolaan stok pangan pada dinas pertanian dan pangan di Kabupaten Pidie. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadiran dan kontribusi terhadap dinas pertanian dan pangan di Kabupaten Pidie. Peran aktif juga merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

²⁹

Soerjono Soekamto, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> (diakses pada tanggal 25 juli 2020).

2. Peran partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja. Peran partisipasif merupakan peran yang diberikan oleh dinas pertanian dan pangan kepada penyuluh lapangan berupa ilmu atau pengetahuan baru terkait dengan bagaimana penyuluh dapat melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan stok pangan pangan dan juga kontribusi dinas pertanian dan pangan dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.

3. Peran pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan individu. Artinya peran pasif hanya di pakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Peran pasif merupakan peran yang diberikan oleh dinas pertanian dan pangan serta penyuluh kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan stok pangan secara mandiri tanpa campur tangan dinas pertanian dan pangan di dalam nya.

2.3 Teori Pengelolaan

2.3.1 Pengertian Pengelolaan

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan.

Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan merupakan substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, metencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.³⁰

Menurut Marry Parket Foller dalam sule pengelolaan merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat yaitu:

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- 2) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 3) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.³¹

2.3.2 Strategi Pengelolaan

Secara bahasa strategi diartikan sebagai siasat, trik atau cara. Sedangkan secara umum definisi dari strategi adalah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan

³⁰ Suharsimi Arikunto, *“Pengelolaan Kelas dan Siswa”*, (Jakarta: CV.Rajawali,1988), hal.8

³¹ Erni Tisnawati Sule, *“Pengantar Manajemen”*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Goup, 2009), hal.6

pengelolaan yaitu suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Perencanaan strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan bahwa tujuan pembangunan akan memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah. Nilai tambah diukur berdasarkan parameter objektif yang telah ditentukan. Keberadaan indikator mutlak adanya dalam proses perumusan strategi pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan kabupaten pidie tahun 2017-2022 melalui Dinas Peertanian dan Pangan Pidie, perlu ditetapkan strategi untuk merumuskan kebijakan pembangunan tahunan atau tahapan pembangunan pertahunnya yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Hal ini nantinya akan memudahkan dan memabantu dalam pembuatan Rencana Kerja SKPK.

2.4 Pangan

2.4.1 Pengertian Pangan

Pangan diidentikkan dengan beras karena jenis pangan yaitu makanan pokok utama warga Indonesia. Beras memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi, beras juga sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin”.³² Ketersediaan pangan sangatlah penting bagi masyarakat, pangan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia

³² Ibid., hal. 9

adalah beras dikarenakan beras makanan pokok warga Indonesia. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui proses kedaulatan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Menurut karsin pangan yaitu kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kkehidupan. Pangan sebagai sumber zat gizi (karbonhidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air) menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan.

2.4.2 Jenis-Jenis Pangan

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh.

Jenis tanaman pangan yaitu:

1) Serealia

Serealia merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen dan dimanfaatkan bijinya atau sebagai sumber karbohidrat. Sebagian besar serealia termasuk dalam anggota suku padi-padian yang biasa disebut sebagai serealia sejati. Tanaman serealia yang banyak

dikonsumsi manusia antara lain, padi, jagung, gandum, gandum durum, jelai, haver, dan gandum hitam.

2) Biji-bijian

Biji-bijian merupakan segala tanaman penghasil biji-bijian yang didalamnya terkandung karbohidrat dan protein. Tanaman biji-bijian yang sering kita konsumsi antara lain seperti kedelai, kacang tanah dan kacang hijau.

3) Umbi-umbian

Tanaman umbi-umbian yaitu tanaman yang ditanam untuk dipanen umbinya karena di dalam umbi terdapat kandungan karbohidrat untuk sumber nutrisi bagi tubuh. Tanaman umbi-umbian yang biasa dimanfaatkan manusia antara lain seperti ubi kayu (singkong), ubi jalar (muntul), talas, wortel, kentang, ganyong.

4) Jenis tanaman lainnya

Selain ketiga jenis tanaman pangan yang telah disebutkan diatas. Ada jenis tanaman pangan lainnya yaitu sagu yang diambil batangnya dan sukun yang merupakan buah.

2.4.3 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan, tidak lepas dari Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang pangan. Disebut dalam Undang-undang tersebut “bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.³³ Ketahanan pangan merupakan ketersediaan pangan dan kemampuan

seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan ketahanan pangan, antara lain:

1. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin dengan menaikkan tingkat produksi pangan secara keseluruhan. Peningkatan pangan dan daya beli masyarakat merupakan hal yang tidak mudah karena terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh suatu negara.
2. Pendistribusian kembali pangan dari daerah ke daerah defisit pangan dengan menggunakan mekanisme yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang kekurangan pangan, selain menaikkan insentif untuk meningkatkan produksi pangan dalam jangka panjang.

Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang ketahanan pangan. Bidang ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Perumusan kebijakan dinas di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

3. Pelaksanaan kebijakan dinas d bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.³⁴

Strategi yang diterapkan dalam rangka keberhasilan pembangunan ketahanan pangan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat;
2. Pengembangan sistem dan usaha agrobisnis;
3. Mewujudkan kebersamaan antara masyarakat sebagai pelakuan pemerintah sebagai fasilitator;
4. Menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, mengelola produksi pangan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, dan mampu menyalurkan kelebihan produksi pangan untuk memperoleh harga yang wajar;

³⁴

Noviyanto Rahmadi, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <https://dkp.samarindakota.go.id/tugas-pokok-fungsi>, (diakses pada tanggal 1 oktober 2020)

5. Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi pihak-pihak terkait dalam perencanaan, kebijakan, pembinaan, dan pengendalian.

2.5 Hambatan

Kata penghambat dalam kamus besar bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal keadaan atau penyebab lainnya yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Hambatan merupakan suatu usaha yang berasal dari dalam diri sendiri, memiliki sifat maupun tujuan untuk menghalangi atau melemahkan sebuah keinginan ataupun suatu kemajuan yang hendak di capai.

Hambatan bagi suatu negara merupakan berasal dari diri sendiri yang bersifat melemahkan dan cenderung menghalangi tercapainya suatu tujuan. Hambatan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kendala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Ada tiga pokok kendala, yaitu batasan fisik dan batasan non fisik. Batasan fisik adalah batasan yang berhubungan dengan kapasitas mesin, sedangkan batasan non fisik berupa permintaan terhadap produk dan prosedur kerja.

2.6 Teori Organisasi

2.6.1 Pengertian Organisasi

Organisasi adalah bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi dan bekerja sama berdasarkan hubungan kerja serta pembagian kerja dan aktivitas yang tersusun secara hirarki dalam suatu struktur untuk mencapai serangkaian tujuan. Organisasi merupakan bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, dipimpin

dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, data, dan lain sebagai yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.³⁵

Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu organisasi dapat dikatakan wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Di kegiatan itu orang-orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut organisasi yang “statis”, karena sekedar hanya melihat dari strukturnya. Di samping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat “Dinamis”. Pengertian ini organisasi dilihat dari pada sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi di dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. “Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarki dan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi. Organisasi merupakan suatu batasan-batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu”.³⁶

Setelah mengetahui pengertian organisasi maka selanjutnya ada manfaat dari organisasi tersebut. Adapun manfaat organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, Komunikasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan cara yang sopan apalagi jika berbicara di depan umum. Maka dari itu, selain sopan juga perlu keberanian dalam menyampaikan aspirasi tersebut di depan umum. Karena memang pada dasarnya setiap masuk dalam organisasi tentu harus menyampaikan beberapa pendapat. Dari hal tersebut secara tidak langsung bisa melatih seseorang dalam berkomunikasi.

³⁵ Muchlisin Riadi, <https://www.kajianpustaka.com/2019/09/pengertian-unsur-bentuk-dan-teori-organisasi.html?m=1>, (diakses pada tanggal 14 agustus 2020)

³⁶ Thoaha, Miftah. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Cetakan Ke-23. (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)

2. Dapat mencapai tujuan, seperti yang dibahas mengenai pengertian organisasi yang tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Sehingga manfaat dari organisasi tersebut adalah untuk mencapai tujuan dengan mudah bersama dengan para anggota.
3. Menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin, dalam organisasi tentu setiap anggota akan bersaing untuk menjadi seorang ketua atau pemimpin dari organisasi tersebut. Maka dari itu organisasi bisa memberikan manfaat dalam membangkitkan jiwa pemimpin.
4. Mampu memecahkan masalah yang ada, masalah dalam setiap organisasi memang biasanya terjadi dalam waktu yang tidak ditentukan. Baik masalah tersebut bersifat kecil atau besar. Seperti disebabkan karena memiliki perbedaan pendapat dari anggota.
5. Memperluas wawasan yang dimiliki, wawasan adalah sebuah pengetahuan yang didapatkan dari mana saja dan kapan pun. Salah satunya dengan masuk dalam sebuah organisasi untuk memperluas wawasan.
6. Memperluas pergaulan dan mengatur waktu, dalam organisasi memang terbagi dari beberapa orang yang berasal dari berbagai kalangan yang berbeda.
7. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Dimana tanggung jawab yang dimaksud adalah bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi amanah.

8. Memiliki mental yang kuat pada saat menghadapi tekanan, mental yang kuat harus dipersiapkan sebelum masuk atau bergabung dalam sebuah organisasi

2.6.2 Bentuk-Bentuk Organisasi

Menurut Manullang, organisasi dapat dikelompokkan dalam empat bentuk, yaitu organisasi garis, Organisasi fungsional, Organisasi garis dan staf, dan Organisasi staf dan fungsional.³⁷

- 1) Organisasi garis merupakan bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Sering juga disebut organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer.
- 2) Organisasi fungsional merupakan organisasi di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut.
- 3) Organisasi garis dan staf merupakan bentuk organisasi pada umumnya diatur oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, serta jumlah pegawainya banyak, pada bentuk organisasi garis dan staf terdapat satu atau lebih tenaga staf.
- 4) Organisasi staf dan fungsional merupakan gabungan dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf.

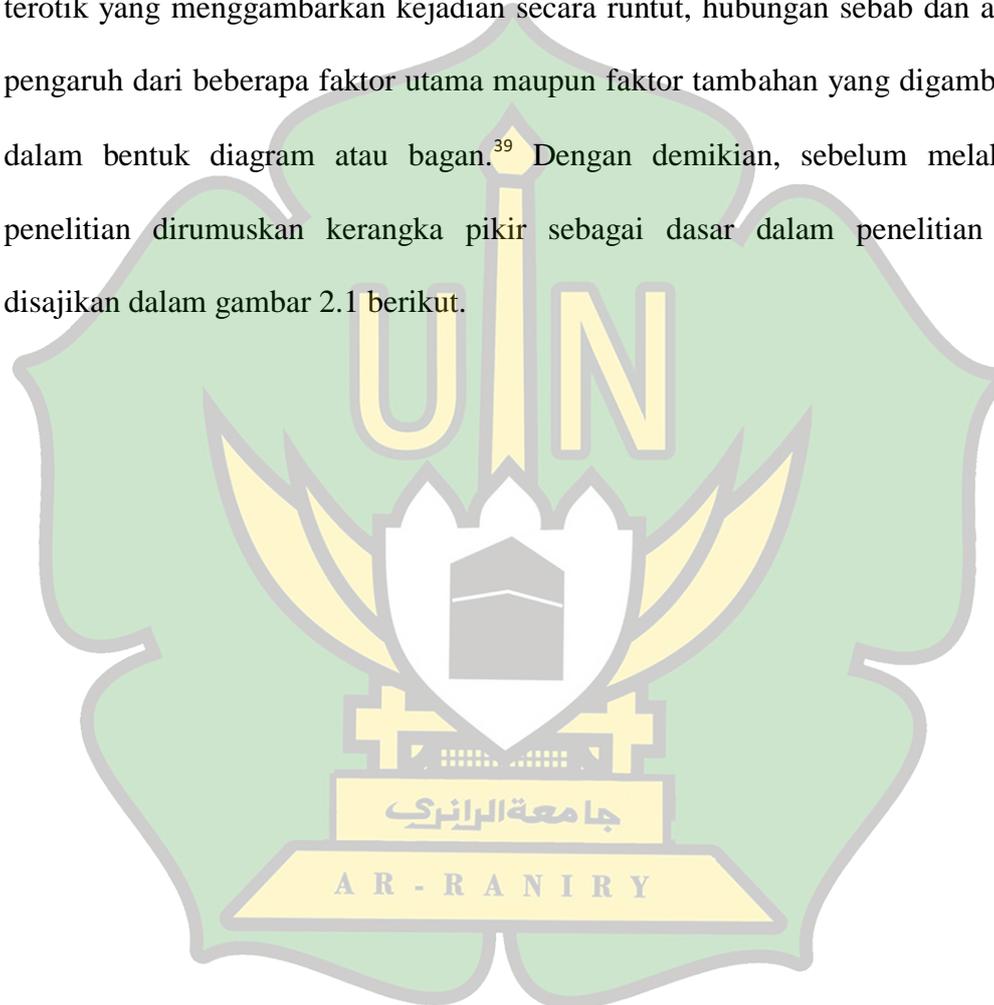
2.6.3 Organisasi Pemerintah Daerah

Organisasi pemerintah daerah sebagai sub-sistem dari organisasi Negara Republik Indonesia adalah suatu organisasi publik. Kebanyakan orang menganggap organisasi pemerintah sebagai organisasi yang besar tapi lamban. “Ciri yang melekat pada organisasi publik tersebut menyebabkan apapun bentuk usaha yang dilakukan pemda untuk memperbaiki kinerja organisasi publik menemui kesulitan. Hal ini terjadi karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi, misalnya bagaimana sistem penerimaan pegawai baru dapat dilaksanakan secara “fair”, sistem penggajian yang tidak adil, dan ketidak tepatan penempatan orang sesuai dengan keahliannya”.³⁸

³⁷ Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
³⁸ Darmanto, “*Organisasi Pemerintah Daerah: Mewujudkan Tata Pamong Yang Baik (GOOD GOVERNANCE)*”, Jurnal, (Universitas Terbuka, 2006)

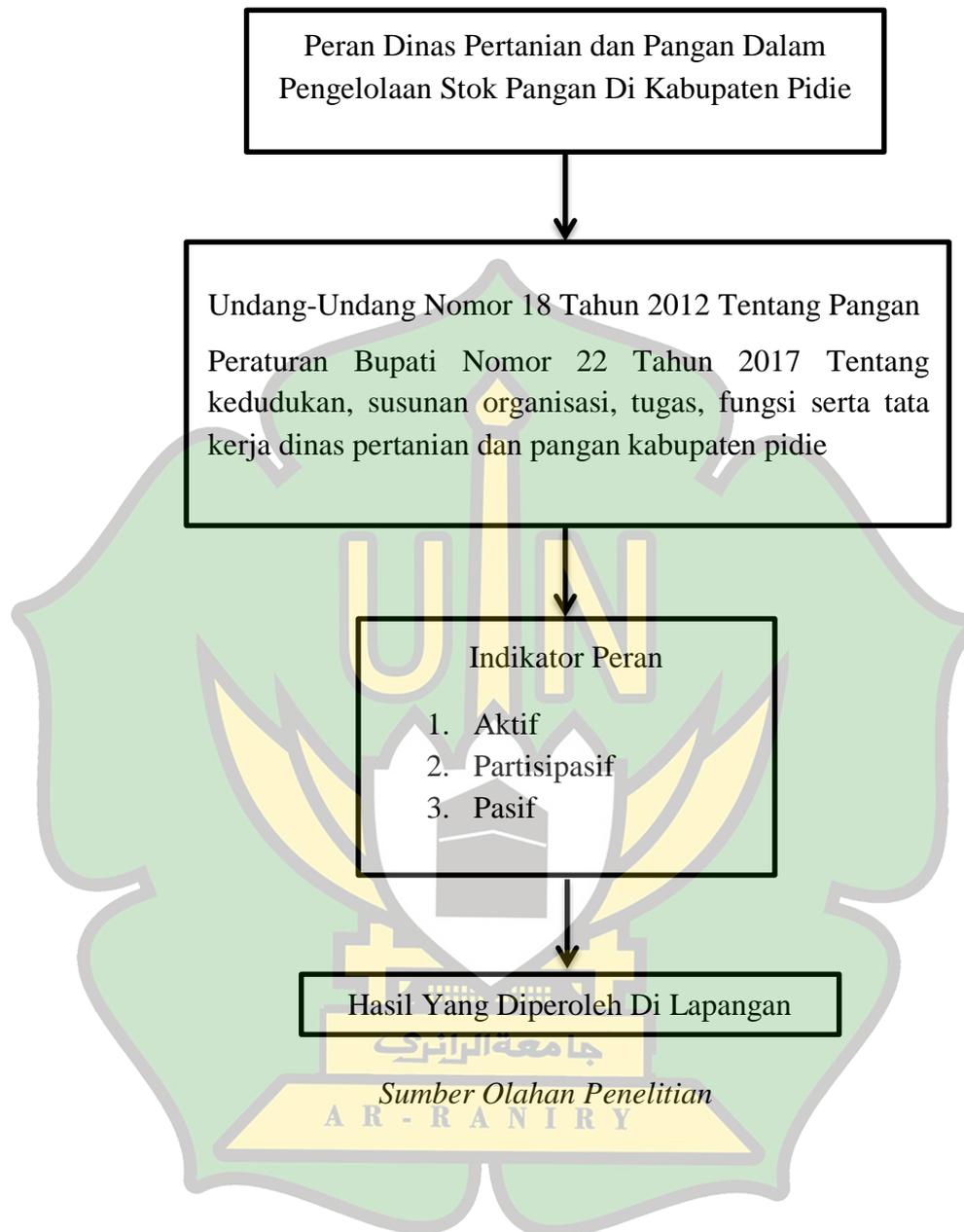
2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dalam skripsi penelitian kualitatif adalah sebuah alur pikir sementara atau proses terjadinya suatu fenomena berdasarkan penelitian pendahuluan yang dikombinasikan dengan kajian pustaka, konsep dan landasan teoritik yang menggambarkan kejadian secara runtut, hubungan sebab dan akibat, pengaruh dari beberapa faktor utama maupun faktor tambahan yang digambarkan dalam bentuk diagram atau bagan.³⁹ Dengan demikian, sebelum melakukan penelitian dirumuskan kerangka pikir sebagai dasar dalam penelitian yang disajikan dalam gambar 2.1 berikut.



³⁹Wayan Suwendra, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: NilaCakra, 2018), hlm. 141.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Pangan

Gambar 3.1 Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie



Secara administrasi Kabupaten Pidie termasuk dalam provinsi Aceh yang sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, sebelah timur dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Barat dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya. Secara Giografis Kabupaten Pidie berada pada koordinat $04,30^{\circ}$ $04,60^{\circ}$ LU (Lintang Utara) dan $95,75$ - $96,20$ (Garis Bujur Timur) Luas Wilayah meliputi $314.160.98$ Ha yang terdiri dari atas daratan rendah dan pesisir dan sebagai besar adalah daratan tinggi. Secara administratif Kabupaten Pidie terdiri atas 23 kecamatan meliputi 94 Mukim

727 desa dengan jumlah penduduk 443.718 jiwa terdiri dari 220.917 jiwa laki-laki (49,78%) + 222.801 jiwa perempuan (50,22%) = 443.718 jiwa; 117.592 KK serta memiliki kepadatan 144 jiwa/Km², dan merupakan salah satu lumbung pangan aceh.

Peraturan Bupati Pidie Nomor 22 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja dinas pertanian dan pangan Kabupaten Pidie. Dinas pertanian dan pangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang pertanian dan pangan serta urusan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan pangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang dilakukan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan bupati No. 22 Tahun 2017, Tanggal 18 Januari 2017 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie mempunyai Skruktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Penyuluhan Pertanian

4. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
5. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
6. Bidang Pertenakan dan Kesehatan Hewan
7. Bidang Tanaman Perkebunan
8. Bidang Ketahanan Pangan

Adapun tugas kepada Dinas Pertanian dan Pangan yaitu sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pertanian;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pertanian dan peternakan;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan dibidang pertanian dan peternakan;
4. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
5. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang pertanian dan peternakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan;
6. Pelaksanaan pengendalian operasional di bidang pertanian dan peternakan;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
8. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, perencanaan, pendataan kepegawaian, keuangan, peralatan, organisasi ketatalaksanaan dan pelaporan dinas;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan peternakan;
10. Pembinaan UPTD; dan

11. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan dinas;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan dinas pertanian dan pangan;
4. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas;
5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas-tugas kepala bidang lainnya sebagai berikut:

1. Bidang tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang tanaman pangan dan hortikultural.
2. Bidang sarana dan prasarana pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sarana dan prasarana pertanian.
3. Bidang tanaman perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang tanaman perkebunan.

4. Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang ketahanan pangan.
5. Bidang penyuluhan pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penyuluhan pertanian di daerah.
6. Bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Per Jenis Kelamin

No	NAMA BIDANG/BAGIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pertanian dan Pangan	65	59	124
2	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan	13	10	23
3	Bidang Penyuluhan Pertanian	9	5	14
4	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	9	6	15
5	Bidang Ketahanan Pangan	6	5	11
6	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	8	4	12
7	Bidang Tanaman Perkebunan	14	5	19
8	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	9	17
TOTAL		132	103	235

Sumber: Data Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Peningkat Pendidikan

No	Pegawai per Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SLTP	2
2.	SLTA	71
3.	D-III	7
4.	D-IV	10
5.	S-1	133
6.	S-2	12

Sumber: Data Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020

Tabel 3.3 Jumlah Pegawai per Jenis Jabatan

No	Pegawai per Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Struktural	24
2.	Fungsional Tertentu	123
3.	Fungsional Umum	88

Sumber: Data Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020

Tabel 3.4 Jumlah Pegawai per Golongan

No	Pegawai per golongan	Jumlah pegawai
1.	II/a	29
2.	II/b	4
3.	II/c	12
4.	II/d	13
5.	III/a	33
6.	III/b	27
7.	III/c	34
8.	III/d	44
9.	IV/a	21
10.	IV/b	11
11.	IV/c	7

Sumber: Data Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020

3.2 Kedudukan dan Kewenangan

Dinas pertanian dan pangan dibentuk berdasarkan Keputusan Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 25 tahun 2016, selanjutnya disahkan dengan Perbup. Nomor. 22 Tahun 2017, Tanggal 18 Januari 2017, merupakan salah satu instansi yang melaksanakan

tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang Pertanian dan pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Meningkatkan pendapatan petani dan peternak dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok melalui peningkatan ketahanan pangan dan penerapan teknologi pertanian serta peningkatan produksi pertanian dan pangan.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Peranan Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah, melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertanian dan pangan, fungsi Dinas antara lain:

1. Pengelolaan Administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.
2. Penyusunan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang pertanian dan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pengendalian operasional dibidang pertanian dan pangan.
5. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran dibidang pertanian dan pangan.

6. Penyusunan program pembinaan sumberdaya manusia dibidang pertanian dan pangan.
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pertanian dan pangan.
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3.4 Visi Misi Dinas Pertanian dan Pangan

a. Visi

Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pidie yang Mulia, Berkualitas, Sejahtera, dan Memiliki Masa Depan.

b. Misi

- 1) Memperkuat Nilai-nilai Keislaman, Kemudian Akhlak dan Kearifan Lokal;
- 2) Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan yang Baik, Tertib, Melayani, Berkualitas, Bersih dan Berwibawa;
- 3) Meningkatkan Kualitas Masyarakat yang berdaya saing global;
- 4) Meningkatkan Kualitas Hidup, Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Merata dan Berkeadilan;
- 5) Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan;
- 6) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi, Industri dan Potensi Wisata yang Kreatif dan Kompetitif;

7) Mewujudkan Penataan Kota, Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi.

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Kabupaten Pidie, perlu dibuat program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan guna mewujudkan masyarakat Pidie yang tertib, melayani, sejahtera dan berakhlak mulia.

Program pembangunan pertanian pada hakikatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan usaha-usaha sistem agribisnis, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian diarahkan kepada tercapainya tujuan pembangunan pertanian jangka panjang yaitu sektor agribisnis sebagai andalan pembangunan nasional.

Adapun rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan yang ditetapkan dalam penetapan kinerja, yang merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Dinas Pertanian dan Pangan Dalam Pengelolaan Stok Pangan di Kabupaten Pidie

Dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie tentunya di perlukan peran dari dinas pertanian dan pangan untuk memastikan pangan yang beredar di masyarakat tetap stabil. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada dinas pertanian dan pangan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pertanian dan pangan Kabupaten Pidie. Dalam pengelolaan pangan Bidang Ketahanan pangan merupakan bidang yang ditugaskan untuk mengurus tentang ketahanan/ pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie. Namun dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2017 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pertanian dan pangan hanya menjelaskan tugas umum setiap bidang tanpa ada rincian kegiatan yang dituangkan kedalam SOP.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.⁴⁰ Ada 10 jenis pangan yang termasuk kedalam jenis pangan pokok, yaitu: (1) Beras, (2) Telur ayam ras, (3) Tahu dan tempe, (4) Daging ayam ras, (5) Ikan kembung segar, (6) Ikan bandeng segar, (7) Gula pasir, (8) Susu, (9) Minyak goreng, dan (10) Terigu.⁴¹

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

⁴¹ Dwi Wahyuni Prabomo, Artikel Pengelompokan komoditi bahan pangan pokok dengan metode analytical hierarchy process, Jakarta : kementerian perdagangan, 2014.

Namun dalam penelitian ini fokus penelitian hanya pada komoditi pangan beras yang menjadi pangan pokok utama di Provinsi Aceh Terkhusus Kabupaten Pidie.

Selanjutnya untuk mengukur sejauh mana peran dinas pertanian dan pangan dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie peneliti menggunakan 3 indikator yaitu peran aktif, peran partisipasif dan peran pasif.

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran pelaksana kegiatan yang selalu aktif dalam tindakan pengelolaan stok pangan pada dinas pertanian dan pangan di Kabupaten Pidie. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadiran dan kontribusi dinas pertanian dan pangan di Kabupaten Pidie. Peran aktif juga merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

Hal ini juga didukung oleh kepala bidang ketahanan pangan melalui wawancara : Dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie, Dinas pertanian hanya melakukan koordinasi pada pihak dolog yang melakukan pengelolaan stok pangan untuk masyarakat luas⁴²

Kemudian kepala seksi distribusi dan cadangan pangan melalui wawancara juga menyampaikan:

Dinas Pertanian dan Pangan hanya melakukan koordinasi dengan pihak dolog terkait dengan bagaimana jumlah pangan (beras) yang beredar di Kabupaten Pidie... sedangkan untuk masyarakat langsung, Dinas Pertanian dan Pangan memiliki penyuluh lapangan yang memang sudah ditugaskan

⁴² Wawancara dengan Bapak Iskandariah, Kepala Bidang Ketahanan pangan, Wawancara oleh peneliti di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, 14 Oktober 2020.

sebagai pekerja lapangan untuk pembinaan masyarakat dan pengelolaan stok pangan melalui lumbung pangan, sosialisasi dan lain sebagainya.⁴³

Selanjutnya untuk menguatkan *Statement* dari pihak Dinas Pertanian Dan Pangan, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua kelompok tani Meugoe Beusare Gampong Kembang Busu :

Di Gampong Kembang Busu terdapat lumbung pangan yang dibangun oleh pemerintah untuk penampungan gabah pasca panen, juga selalu ada sosialisasi terkait dengan bagaimana pengelolaan stok pangan yang dilakukan dalam beberapa kali dalam satu tahun, kapan dan dimana pangan beras harus diproduksi serta penjualan, dan juga pendampingan dari penyuluh tentang distribusi beras.⁴⁴

Dari ketiga hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa dinas pertanian dan pangan sudah berperan berdasarkan hasil observasi dan wawancara untuk pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie dengan skala besar yaitu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan dolog untuk stok pangan, dan juga melakukan pengelolaan stok pangan skala kecil dengan membangun lumbung pangan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 pasal 12 ayat 5 disebutkan bahwa untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dilakukan dengan mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal serta mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan dan penyimpanan pangan.

⁴³ Wawancara dengan Ibuk Nuraini, Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, Wawancara oleh peneliti di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, 14 Oktober 2020.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Hamdan Umar, Ketua Kelompok Tani, Wawancara oleh peneliti di LPM meugoe beusare Gampong Kembang Busu. 20 Oktober 2020.

2. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja. Peran partisipasif merupakan peran yang diberikan oleh dinas pertanian dan pangan kepada penyuluh lapangan berupa ilmu atau pengetahuan baru terkait dengan bagaimana penyuluh dapat melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan stok pangan dan juga kontribusi dinas pertanian dan pangan dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan menyampaikan dalam wawancara dengan peneliti:

Dinas Pertanian dan Pangan melakukan kerja sama dengan pihak bulog atau dolog, jika terjadi kenaikan harga secara drastis di pasaran, maka Dinas Pertanian dan Pangan akan menyelenggarakan pasar murah untuk masyarakat guna meringankan pengeluaran biaya ekonomi. Penjualan di pasar murah menjual kebutuhan pokok, meliputi beras, gula, telur, minyak goreng, tepung dan lain sebagainya.⁴⁵

Kepala seksi distribusi dan cadangan pangan juga menyampaikan dalam wawancara dengan peneliti:

untuk menjaga stabilitas harga dipasaran memiliki tingkat kesulitan yang kadang sulit diatasi, karena dinas pertanian dan pangan tidak mengetahui dari mana asal pangan yang beredar dipasaran, berapa jumlah pangan yang masuk, seperti cabai atau bawang, Dinas Pertanian dan Pangan tidak mengetahui bagaimana penentuan harga di pasar, karena penentuan harga di pasar sudah memasuki ranah para pedagang, akan tetapi jika memang terjadi kelangkaan pangan pokok seperti beras, Dinas Pertanian dan Pangan meminimalisir dengan menyelenggarakan pasar murah... jika untuk para penyuluh lapangan Dinas Pertanian dan Pangan

⁴⁵

Wawancara dengan Bapak Iskandariah, Kepala Bidang Ketahanan pangan, Wawancara oleh peneliti di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, 14 Oktober 2020.

menyelenggarakan pelatihan juga terkait dengan bagaimana sosialisasi dimasyarakat tentang pengelolaan pangan.⁴⁶

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat guna mengkonfirmasi pernyataan di atas :

Jika pada tanaman petani terdapat hama, dinas pertanian dan pangan memberikan obat hama kepada petaniguna melakukan penyemprotan secara massal oleh petani, serta pemberian bibit, pupuk, setiap musim turun sawah dan juga penyuluh pertanian juga menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan bagaimana metode tanam untuk hasil panen yang lebih baik.⁴⁷

Di Gampong Kembang Busu tidak selalu diselenggarakan pasar murah oleh Dinas Pertanian dan Pangan, akan tetapi hanya pada waktu tertentu saja seperti pada bulan Ramadhan atau sebelum lebaran.⁴⁸

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan sudah berperan dalam melaksanakan peran partisipatif untuk pelaksanaan pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie, dengan menyelenggarakan pasar murah disaat terjadi kenaikan harga dipasaran pada waktu tertentu serta juga melakukan peningkatan kualitas SDM (penyuluh). Dari hasil observasi didapati juga bahwa penyuluh juga melakukan pertemuan dengan kelompok tani dua kali dalam setahun untuk penyelenggaraan sosialisasi terkait dengan pengelolaan pangan beras kepada kelompok tani dan setahun sekali dengan dinas pertanian dan pangan untuk pertanggung jawaban kegiatan selama satu tahun.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibuk Nuraini, Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, Wawancara oleh peneliti di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, 14 Oktober 2020.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Aiyub, Ketua Kelompok Tani, Wawancara oleh peneliti via telpon, 16 Oktober 2020.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Hamdan Umar, Ketua Kelompok Tani, Wawancara oleh peneliti di LPM meugoe beusare Gampong Kembang Busu. 20 Oktober 2020.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang dilaksanakan individu. Artinya peran pasif hanya di pakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Peran pasif merupakan peran yang diberikan oleh dinas pertanian dan pangan serta penyuluh kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan stok pangan secara mandiri tanpa campur tangan dinas pertanian dan pangan di dalamnya.

Kepala bidang ketahanan pangan menyampaikan dalam wawancara dengan peneliti:

Dinas Pertanian dan Pangan memberikan bantuan kepada masyarakat (kelompok tani) seperti gedung, lahan, biaya sebesar 40 juta untuk pembeli gabah di masyarakat dan lain sebagainya, semua bantuan tersebut merupakan bentuk Dinas Pertanian dan Pangan dan pemerintah Kabupaten Pidie Khususnya untuk memandirikan masyarakat, dengan tujuan masyarakat bisa mengelola sendiri hasil panen (gabah) yang beli dari masyarakat juga.⁴⁹

Kepala seksi distribusi dan cadangan pangan dalam wawancara dengan peneliti:

Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pertemuan tahunan dengan penyuluh lapangan, terkait dengan bagaimana progres selama dilapangan, apakah ada peningkatan atau tidak, akan tetapi selama proses pelaksanaan selama ini sudah lebih baik ... penyuluh lapangan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada masyarakat terkait bagaimana proses pengelolaan stok pangan, Dinas Pertanian dan Pangan memberikan kelonggaran kepada kelompok tani dengan tujuan agar para petani mandiri, mandiri dalam pengertian mampu mengelola lumbung pangan yang sudah diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Iskandariah, Kepala Bidang Ketahanan pangan, Wawancara oleh peneliti di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, 14 Oktober 2020.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibuk Nuraini, Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, Wawancara oleh peneliti di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, 14 Oktober 2020.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat untuk mengkonfirmasi:

para petani melalui kelompok tani di setiap Gampong melakukan pertemuan secara berkala dengan penyuluh dua kali dalam setahun atau sebelum musim tanam padi di mulai... Lumbung pangan yang berada pada Gampong Kembang Busu merupakan lumbung pangan untuk satu wilayah kecamatan saja yang disebut dengan Gabungan Kelompok tani (Gapoktan), para petani yang tergabung dalam Gapoktan melakukan kerja secara gotong royong dalam pelestarian lumbung pangan, bantuan dana yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan kepada sebanyak 40 juta untuk alokasi pembelian gabah yang kemudian di tampung serta akan dikelola kembali saat musim kemarau atau gagal panen terjadi.⁵¹

Dinas Pertanian dan Pangan memberikan bantuan kepada kelompok tani dengan tujuan untuk memandirikan masyarakat, sehingga masyarakat mandiri dalam pengelolaan pangan beras yang kemudian menghasilkan perputaran uang yang dapat digunakan oleh masyarakat tersebut, sehingga terwujudlah kesejahteraan sosial bagi para petani.⁵²

Dari hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa dinas pertanian dan pangan sudah berperan namun belum efektif dalam melakukan peran pasif yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola pangan secara mandiri untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani di Kabupaten Pidie. Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 15 disebutkan bahwa apabila kebutuhan pangan untuk konsumsi dan cadangan pangan daerah sudah tercukupi maka pangan dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya.

Namun dari hasil penelitian juga didapati bahwa pangan beras yang sudah dikelola oleh masyarakat terhambat dalam proses penjualan beras keluar daerah dikarenakan pengetahuan masyarakat yang kurang terkait dengan ekspor.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Hamdan Umar, Ketua Kelompok Tani, Wawancara oleh peneliti di LPM meugoe beusare Gampong Kembang Busu. 20 Oktober 2020.

⁵² Wawancara dengan Bapak Aiyub, Ketua Kelompok Tani, Wawancara oleh peneliti via telpon, 16 Oktober 2020.

Seharusnya dinas pertanian dan pangan melakukan edukasi kepada masyarakat melalui LSM tentang mekanisme dan tata cara ekspor beras keluar daerah Aceh agar tidak terjadinya penumpukan gabah yang berlebihan untuk menjaga kualitas beras yang akan diproduksi.

Setelah peneliti menganalisa tentang peran dinas pertanian dan pangan dalam pengelolaan stok pangan di kabupaten Pidie berdasarkan 3 Indikator yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif dengan cara melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak dinas pertanian dan pangan yaitu kepala bidang ketahanan pangan, kepala seksi ketersediaan dan kerawanan pangan, serta masyarakat yang terdampak untuk memperkuat data penelitian. Maka, peran dinas pertanian dan pangan dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie dikatakan sudah berperan namun karena dinas pertanian dan pangan sudah menjalankan beberapa tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

4.2 Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Pengelolaan Stok Pangan di Kabupaten Pidie

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan stok pangan tentunya mengalami kendala-kendala di dalamnya baik secara internal maupun eksternal. Dari hasil penelitian di dapat bahwa pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie hanya berjalan tanpa panduan pelaksanaan atau SOP.

1. Hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Stok Pangan di Kabupaten Pidie

Hambatan merupakan rintangan yang terjadi dari dalam, yang terjadi karena kelemahan dari dinas pertanian dan pangan. Dalam pelaksanaan program

pengelolaan stok pangan di kabupaten Pidie terdapat hambatan-hambatan yang memperlambat jalannya program pengelolaan stok pangan, diantaranya :

a. Koordinasi yang sulit

Untuk dapat tercapainya efisiensi, efektifitas dan produktifitas dari kegiatan pengelolaan stok pangan tentunya diperlukan koordinasi antara dinas pertanian dan pangan dengan lembaga terkait. Koordinasi merupakan salah satu jalan bagi dinas pertanian dan pangan untuk mengetahui berapa banyak beras yang beredar di pasaran dan berapa banyak gabah yang belum diproduksi, dari hasil penelitian di dapati bahwa dinas pertanian dan pangan belum melakukan koordinasi yang baik dengan pihak swasta (dolog) terkait jumlah beras yang di produksi dan dipasarkan. Dinas pertanian dan pangan juga mengatakan bahwa pihaknya sangat sulit mendapatkan data dari dolog terkait dengan berapa jumlah gabah yang di kelola.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan kepala Bidang Ketahanan Pangan :

tantangan terbesar Dinas Pertanian dan Pangan yaitu dinas pertanian dan pangan memiliki tingkat kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan pihak swasta yaitu dolog terkait dengan berapa banyak jumlah gabah yang di tampung serta berapa banyak beras yang diproduksi yang kemudian di pasarkan kepada masyarakat.⁵³

Dari hasil wawancara diatas dan dikaitkan dengan hasil observasi maka penulis menyimpulkan bahwa koordinasi yang dibangun oleh dinas pertanian dan pangan belum efektif, seharusnya dinas pertanian dan pangan

⁵³

Wawancara dengan Bapak Iskandariah, Kepala Bidang Ketahanan pangan, Wawancara oleh peneliti di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, 14 Oktober 2020.

juga melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan dolog untuk memperoleh jumlah pangan beras yang beredar di masyarakat.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP merupakan salah satu hal paling penting dalam pelaksanaan program untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan stok pangan menjadi lebih efektif dan efisien serta mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dinas pertanian dan pangan, akan tetapi dari hasil penelitian dan pengamatan lapangan di dapati bahwa tidak adanya SOP dalam pelaksanaan pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie, namun hanya merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pertanian dan pangan Kabupaten Pidie.⁵⁴ Seharusnya dinas pertanian dan panga kabupaten pidie untuk mempermudah proses pelaksanaan pangan di kabupaten tersebut, dan juga para SDM membangun komunikasi yang baik antar tim untuk penentuan terkait bagaimana proses perencanaan pembentukan SOP untuk mempermudah pelaksanaan tugas

2. Tantangan Pelaksanaan Pengelolaan Stok Pangan di Kabupaten Pidie

Tantangan merupakan sesuatu upaya yang dilakukan untuk membangkitkan dan menunjukkan kemampuan. Dalam pelaksanaan program pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie, tantangan yang memperlambat jalannya program pengelolaan stok pangan adalah kurang tersedianya lumbung

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Iskandariah, Kepala Bidang Ketahanan pangan, Wawancara oleh peneliti di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, 14 Oktober 2020.

pangan. Lumbung pangan merupakan tempat penampungan gabah pasca panen yang dikelola oleh kelompok tani, namun dari hasil penelitian di dapati bahwa lumbung pangan yang ada di Kabupaten Pidie berjumlah 2 Lumbung Pangan di 2 kecamatan yang berbeda yaitu kecamatan Indrajaya dan Kecamatan Mutiara dari seluruh kecamatan yang berada pada wilayah Pidie.

Hal ini sesuai dengan Penyuluh/ketua kelompok tani gabungan kelompok tani Saree Meugoe Gampong Neulop II dalam wawancara dengan peneliti:

selama proses pelaksanaan pengelolaan stok pangan oleh dinas pertanian dan pangan memiliki tantangan dan hambatan yang menghambat jalannya program, seperti kurangnya lumbung pangan, saat ini lumbung pangan di Kabupaten Pidie berada di dua kecamatan berbeda yang dijadikan sebagai percontohan untuk masyarakat umum dalam pengelolaan stok pangan.⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa ketersediaan lumbung pangan untuk penampungan dan pengelolaan gabah menjadi beras sangat penting bagi masyarakat di kabupaten Pidie terkhusus di wilayah sektor pertanian. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian Dan Pangan untuk memfasilitasi masyarakat di kecamatan lainnya agar pengelolaan pangan menyediakan lahan untuk membangun lumbung pangan serta mengedukasi masyarakat secara umum untuk pengelolaan pangan.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Aiyub, Ketua Kelompok Tani, Wawancara oleh peneliti via telpon, 16 Oktober 2020.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari bab pembahasan mengenai peran Dinas Pertanian Dan Pangan Dalam Pengelolaan Stok Pangan Di Kabupaten Pidie, berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Lemahnya Peran Dinas Pertanian Dan Pangan dalam pengelolaan stok pangan Di Kabupaten Pidie, hal ini dapat dilihat dari 3 indikator yaitu: pertama peran aktif, dinas pertanian sudah berperan untuk pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie dengan skala besar yaitu melakukan kerja sama dan koordinasi dengan dolog untuk stok pangan, dan juga melakukan pengelolaan stok pangan skala kecil dengan membangun lumbung pangan kepada masyarakat. Kedua peran partisipasif, Dinas Pertanian Dan Pangan sudah berperan dalam melaksanakan peran partisipasif dalam pelaksanaan pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie, dengan menyelenggarakan pasar murah disaat terjadi kenaikan harga dipasaran pada waktu tertentu serta juga melakukan peningkatan kualitas SDM. Ketiga peran pasif, dinas pertanian dan pangan sudah berperan namun belum efektif dalam melakukan peran pasif karena hasil penelitian juga didapati bahwa pangan beras yang sudah dikelola oleh masyarakat terhambat dalam proses penjualan beras keluar daerah dikarenakan pengetahuan masyarakat yang kurang terkait dengan ekspor. Seharusnya dinas pertanian dan pangan melakukan edukasi kepada masyarakat melalui LSM tentang mekanisme

dan tata cara ekspor beras keluar daerah Aceh agar tidak terjadinya penumpukan gabah yang berlebihan untuk menjaga kualitas beras yang akan diproduksi.

2. Lemahnya penyesaian Tantangan dan hambatan pelaksanaan pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie, Tantangannya yaitu lumbung pangan yang masih kurang, lumbung pangan yang ada di Kabupaten Pidie berjumlah 2 lumbung pangan di 2 kecamatan yang berbeda. Hambatannya memperlambat jalannya program pengelolaan stok pangan yaitu koordinasi yang sulit, dinas pertanian belum melakukan koordinasi yang baik dengan pihak swasta (dolog) terkait jumlah beras yang diproduksi dan dipasarkan dan tidak adanya SOP dalam pelaksanaan pengelolaan stok pangan.

5.2 Saran

1. Seharusnya dinas pertanian dan pangan melakukan edukasi kepada masyarakat melalui LSM tentang mekanisme dan tata cara ekspor beras keluar daerah Aceh agar tidak terjadinya penumpukan gabah yang berlebihan untuk menjaga kualitas beras yang akan diproduksi.
2. Untuk lumbung pangan yang masih kurang diharapkan dinas pertanian dan pangan mampu memfasilitasi masyarakat dikecamatan lainnya untuk pengelolaan pangan dengan menyediakan lahan untuk membangun lumbung pangan serta mengedukasi masyarakat secara umum untuk pengelolaan pangan.

3. Dinas Pertanian dan Pangan diharapkan pelaksanaan membuat SOP atau jurnal untuk mempermudah pengelolaan pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Ed.2. Jakarta: Kencana.
- J.Moleong, Lexy. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- J.R. Raco. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*.
- Manullang. (2009). *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Milles dan Heberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Musfiqon. (2012). *Panduang Lengkap Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Public Publisher.
- Musaddad, Aco. (2018). *Annangguru*. Sulawesi Barat: Gerbang Visual.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi, Arikunta. (1988). *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Suwendra, Wayan. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Nila Cakra.
- Suryana. (2010). *Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif buku ajaran perkuliahan*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Tangkilisan. Nogi Hessel S. (2005). *Managemen Public*. Jakarta: PT Grasindo.
- Thoha, Miftah. (2012). *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tisnawati Sule, Erni. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Goup.

Waluya, Bagja. (2007). *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT setia purna inves.

Sumber Jurnal atau Skripsi

Alim Bahri Usmani. (2013). *Persepsi masyarakat terhadap peranan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi sektor produksi dan distribusi pangan*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi.

Arief Daryanto.(2016). *Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan*. Jawa Barat:Institut Pertanian Bogor. Jurnal

Asril Gunawan. (2017). *Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Indrapuri*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Skripsi.

Darmanto. (2006). *Organisasi Pemerintah Daerah:Mewujudkan Tata Pamong Yang Baik(GOOD GOVERNANCE)*. Universitas Terbuka. Jurnal.

Hamami Cahya Prastika. (2016). *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*. Universitas Airlangga. Skripsi.

Hening Febriana. (2019). *Strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Tangerang*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Skripsi.

Sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi

BPS Kabupaten Pidie, *Pidie Dalam Angka*, Tahun 2018.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.

Sumber Lain

Dwi Wahyuni Prabomo. (2014). *Pengelompokan komoditi bahan pangan pokok dengan metode analytical hierarchy process*. Jakarta : kementerian perdagangan. Artikel.

Miftah Thoha. <https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>(diakses pada tanggal 25 juli 2020).

Muchlisin Riadi, <https://www.kajianpustaka.com/2019/09/pengertian-unsur-bentuk-dan-teori-organisasi.html?m=1>, (diakses pada tanggal 14 agustus 2020).

Noviyanto Rahmadi, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <https://dkp.samarindakota.go.id/tugas-pokok-fungsi>, (diakses pada tanggal 1 oktober 2020).

Serambinews, *musim rendengan kali ini, produksi padi menurun*, <https://aceh.tribunnews.com/2019/02/26/musim-rendengan-kali-ini-produksi-padi-di-pidie-menurun>,(diakses pada tanggal 19 November 2019).

Soerjono Soekamto, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> (diakses pada tanggal 25 juli 2020).

Wawancara

Iskandariah, Kepala Bidang Ketahanan pangan, Wawancara oleh peneliti di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, 14 Oktober 2020.

Nuraini, Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, Wawancara oleh peneliti di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, 14 Oktober 2020.

Hamdan Umar, Ketua Kelompok Tani, Wawancara oleh peneliti di LPM meugoe beusare Gampong Kembang Busu. 20 Oktober 2020.

Aiyub, Ketua Kelompok Tani, Wawancara oleh peneliti via telpon, 16 Oktober 2020.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 346/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **22 Januari 2020**
- Menetapkan** :
PERTAMA :
Menunjuk Saudara :
1. Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Reka Yolanda
NIM : 160802045
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam Pengelolaan Stok Pangan di Kabupaten Pidie
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2020
An. Rektor
Dekan,

Ernita Dewi



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1378/Un.08/FISIP I/PP.00.9/08/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **REKA YOLANDA / 160802045**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Baroh Cot, Kec.Bandar Baru, Kab.Pidie Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Dinas Pertanian dan Pangan Dalam Pengelolaan Stok Pangan Di Kabupaten Pidie**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Agustus 2020
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 23 Desember
2020*

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

DRAFF WAWANCARA

A. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

1. Sejauh mana peran dinas pertanian dan pangan dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie pak/Ibu?
2. Apa saja tugas pada bidang ketahanan pangan dalam pengelolaan stok pangan ?
3. Adakah payung hukum/SOP yang dijadikan sebagai pedoman pengelolaan stok panga di dinas pertanian dan pangan di Kabupaten Pidie? Jika ada SOP nya boleh saya lihat pak? (minta juga SOP nya)
4. Pada tahun lalu terjadi penurunan hasil panen pada sektor padi yang di akibatkan oleh hama wereng, bagaimana dinas pertanian menanggapi dan menyelesaikan persoalan tersebut?
5. Apakah ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana pengelolaan stok pangan? Jika ada, bentuk sosialisasi seperti apa ?
6. (pertanyaan ini khusus kalau narasumber nge jawab pertanyaan no.5 kalau sosialisasi yang dilakukan berbentuk tatap muka kepada masyarakat) apakah sosialisasi dilakukan secara berskala? Kapan dan dimana sosialisasi tersebut dilakukan?
7. Apakah dinas pertanian dan pangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie ? jika ada, siapa yang mengawasi dan bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan ?
8. Dalam pengelolaan stok pangan apakah saran dan prasana sudah memadai?
9. Apakah dinas pertanian dan pangan mefasilitasi masyarakat di sektor pertanian untuk peningkatan hasil produksi/panen ? jika ada, fasilitas seperti apa yang diberikan ?
10. Apa yang menjadi kendala terbesar dalam pengelolaan stok pangan di Pidie ?

11. Apa saja hambatan yang di alami oleh dinas pertanian dan pangan dalam pengelolaan stok pangan selama ini Pak/Ibu ?
12. Apa saja yang menjadi tantangan baik secara internal maupun eksternal selama proses pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie ?

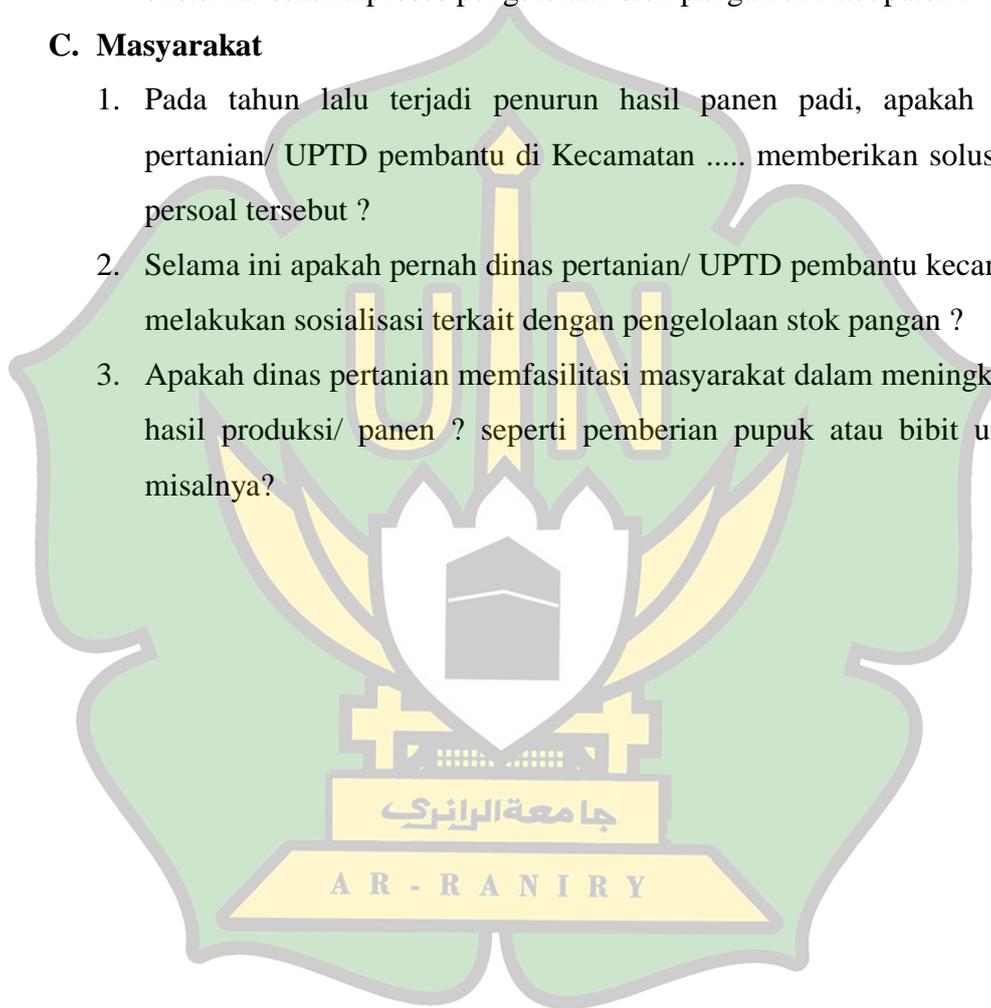
B. Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

1. Apa saja tugas pada seksi ketersediaan dan kerawanan pangan ?
2. Adakah SOP yang dijadikan sebagai pedoman pengelolaan stok pangan di dinas pertanian dan pangan di Kabupaten Pidie? Jika ada ada SOP nya boleh saya lihat pak? (minta juga SOP nya)
3. Apakah dinas pertanian melakukan kerja sama dengan lembaga lain/ pihak swasta untuk pengelolaan stok dan ketahanan pangan di Kabupaten Pidie ? jika ada, siapa saja yang terlibat ?
4. Apakah ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana pengelolaan stok pangan jika sewaktu-waktu terjadi kelangkaan pangan? Jika ada, bentuk sosialisasi seperti apa ?
5. (pertanyaan ini khusus kalau narasumber nge jawab pertanyaan no.4 kalau sosialisasi yang dilakukan berbentuk tatap muka kepada masyarakat) apakah sosialisasi dilakukan secara berskala? Kapan dan dimana sosialisasi tersebut dilakukan?
6. Apakah pada seksi ketersediaan dan kerawanan pangan ada mengumpulkan data dari lapangan terkait seberapa banyak stok pangan dan pengelolaannya di masyarakat ?
7. Jika sewaktu-waktu terjadi kelangkaan pangan di masyarakat, misal kurangnya kebutuhan pokok yang menyebabkan pembengkakan harga, bagaimana dinas pertanian dan pangan menanggapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut ?
8. Apakah dinas pertanian dan pangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie ? jika ada, siapa yang mengawasi dan bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan ?
9. Dalam pengelolaan stok pangan apakah saran dan prasana sudah memadai?

10. Selama ini apa yang menjadi kendala terbesar dalam pengelolaan stok pangan di Pidie ?
11. Apa saja hambatan yang di alami oleh dinas pertanian dan pangan dalam pengelolaan stok pangan selama ini ?
12. Apa saja yang menjadi tantangan baik secara internal maupun eksternal selama proses pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie ?

C. Masyarakat

1. Pada tahun lalu terjadi penurunan hasil panen padi, apakah dinas pertanian/ UPTD pembantu di Kecamatan memberikan solusi atas persoalan tersebut ?
2. Selama ini apakah pernah dinas pertanian/ UPTD pembantu kecamatan melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan stok pangan ?
3. Apakah dinas pertanian memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan hasil produksi/ panen ? seperti pemberian pupuk atau bibit unggul misalnya?





Wawancara dengan Bapak Iskandariah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, 14 Oktober 2020



Wawancara dengan Ibuk Nuraini, Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, 14 Oktober 2020



Wawancara dengan Bapak Hamdan Umar, Ketua Kelompok Tani, di LPM Meugoe Beusare Gampong Kembang Busu, 20 Oktober 2020